

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas diterapkannya *National Ocean Policy* di tengah kondisi diplomasi kemaritiman Indonesia dengan negara lain ditingkatkan. Identifikasi penerapan *National Ocean Policy* menggunakan metode yuridis normatif dengan menarik indikator pengelolaan dan perlindungan kawasan Teluk Tomini berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum internasional yang sudah berlaku. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa peraturan pengelolaan dan perlindungan hukum di kawasan teluk tomini baik meliputi biota laut, pemanfaatan ruang, perlindungan masyarakat pesisir hingga jalur keamanan (poros) maritim kawasan didominasi adopsi dari instrumen internasional yang sebagian ditransformasikan dalam UU Kelautan dan sebagian tentang focus keamanan kawasan di atur dalam *National Ocean Policy*. Hal ini kemudian melahirkan beberapa prioritas dan *pending matters* yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan pembangunan kawasan pesisir dengan tetap menjamin kepastian hukum dan mengesampingkan orientasi politik.

**Kata kunci:** Hukum Internasional; *National Ocean Policy*; Perlindungan Hukum; Teluk Tomini

## **ABSTRACT**

This research aims to find out the effectiveness of the implementation of the National Ocean Policy in the midst of Indonesia's maritime diplomacy conditions with other countries. Identify the implementation of the National Ocean Policy using normative juridical methods by withdrawing indicators of the management and protection of the Tomini Bay area based on national law and international law. The identification results showed that several legal management and protection regulations in the Tomini Bay area both include marine biota, space utilization, protection of coastal communities to maritime security lines (shafts) of the region dominated by the adoption of international instruments which were partly transformed in the Marine Law and partly about the focus of regional security regulated in the National Ocean Policy.

This then gives to several priorities and pending matters that need to be considered by local and central governments to improve the development of coastal areas while ensuring legal certainty and overriding political orientation.

**Keywords:** International Law; National Ocean Policy; Legal Protection; Tomini Bay